



Pembentukan dan Perkembangan Parmusi Cabang Padang Pariaman (1968-1971)

The Formation and Development of the Parmusi Branch in Padang Pariaman (1968-1971)

Irmun*, SMP Negeri 5 Payakumbuh, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the formation and development of the Indonesian Muslim Party (Parmusi) Branch in Padang Pariaman during the period 1968-1971. Parmusi was established in 1968 with the goal of reviving the legacy of Masyumi, which was disbanded by Soekarno. The establishment of the Parmusi branch in Padang Pariaman was formalized through Decree Number 214/1/1968. Although initially expected to become a new political force, Parmusi faced various challenges, including intervention from the New Order government and Laksusda. Under the leadership of Raisuddin Muchtar and Alhadar Alam, Parmusi endeavored to consolidate support and participate in the 1971 elections, despite encountering electoral fraud and political pressure. Parmusi's campaign and political activities were often closely monitored by intelligence and government officials. The results of the 1971 elections showed that Parmusi secured 7 seats in the Padang Pariaman Regional House of Representatives, although it remained under the dominance of Golkar. This study provides insights into local political dynamics and the struggles of an Islamic political party amid state surveillance and intervention.

ARTICLE HISTORY

Received 10/03/2024
Revised 11/04/2024
Accepted 13/05/2024
Published 15/06/2024

KEYWORDS

Parmusi; Islamic Politics; New Order; 1971 Elections; Padang Pariaman.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ irmun@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya, era Orde Baru ditandai dengan peningkatan produktivitas yang signifikan, pencapaian swasembada beras pada tahun 1984, dan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan yang konsisten sebesar 7% sepanjang tahun 1960an dan 1980an (Kusumowidagdo, 1983). Kapasitas luar biasa pemerintah, yang dipimpin oleh ahli strategi ekonomi Widjojo Nitisastro, dalam berhasil mengatasi krisis ekonomi pada awal tahun 1960an sungguh menakjubkan. Selain prestasi ekonomi yang diraih pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Orde Baru juga mempunyai kendali atas urusan sosial dan politik. Eep Saefulloh Fatah berpendapat bahwa untuk membangun stabilitas politik, perlu menghilangkan lawan-lawan negara yang berpotensi memusuhi dan melemahkan wibawa Orde Baru (Fatah, 2010). Kelompok ini terdiri dari kekuatan yang setia kepada Soekarno, kekuatan Komunis, kelompok PSI, dan Fraksi Masyumi.

Pada masa munculnya Orde Baru, tokoh-tokoh yang sebelumnya mendukung Masyumi dan berperan penting dalam menghancurkan Orde Lama, bercita-cita untuk menghidupkan kembali dan memulihkan Masyumi yang sempat dilarang oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (Mintaredja, 1968). Meski demikian, Soeharto dengan tegas menolak rencana tersebut dan menyatakan penolakannya, terbukti dengan suratnya kepada Prawoto Mangkusasmito tertanggal 6 Januari 1967. Meskipun ada penolakan terhadap upaya untuk mengembalikan partai berlambang bulan dan bintang, sebuah deklarasi ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1967, untuk mendirikan Partai Muslim Indonesia (Parmusi) (Jainuddin, 2019). Partai ini mendapat dukungan dari 16 ormas Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Umat Islam (BKAM) (Warsito, 2020).

Pada tanggal 6 Februari 1968 dibentuk Komite 7 (Komisi Pembentukan Parmusi), dengan KH Faqih Usman sebagai ketua, Agus Sudono sebagai sekretaris, dan Hasan Basri, Anwar Harjono, E.Z Muttaqien, Marzuki Yatim, dan Sjamsurijal sebagai anggota. Meski demikian, keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam persoalan internal Parmusi terlihat jelas ketika beredar telegram rahasia yang menolak terpilihnya Pak Moh. Roem sebagai Ketua Umum Parmusi. Dalam kapasitasnya sebagai penerus, Soeharto memberikan persetujuannya atas terpilihnya H. Djarnawi Hadikusumo sebagai ketua umum dan Drs. Lukman Harun sebagai Sekretaris Jenderal Parmusi (Salam, 2018).



Mengingat mayoritas anggota Parmusi merupakan mantan pendukung Bulan Bintang, maka Parmusi sebagai partai politik baru diperkirakan akan menggantikan Masyumi dan mengembalikan pamornya yang dulu. Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, dilakukan imbauan kepada para pemimpin daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menciptakan peluang pengembangan masyarakat di tingkat daerah, cabang, dan cabang pembantu, khususnya yang fokus pada Parmusi (Wawancara dengan Alhadar Alam).

Padang Pariaman, sebuah daerah yang didirikan pada tahun 1968, bereaksi secara efisien terhadap kemunculan Parmusi. Berdirinya Parmusi Cabang Padang Pariaman dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Partai Parmusi Nomor 214/1/1968 yang mengangkat Raisuddin Muchtar sebagai pimpinan Partai Muslim Indonesia Cabang Padang Pariaman. Perkembangan administrasi Cabang Parmusi Padang di Pariaman merupakan tantangan karena sulitnya akses nagari-nagari pada saat itu. Pasalnya, masyarakat masih mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa PRRI yang menimpa tokoh Masyumi pada periode tersebut. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan tekanan dan campur tangan, disertai kehadiran Pelaksana Daerah Khusus (Laksusda).

Artikel ini mengeksplorasi aspek menarik dari kajian Parmusi, sebuah partai politik Islam yang berdiri di Padang Pariaman pada masa awal Orde Baru. Baik di tingkat pusat maupun di Padang Pariaman, Parmusi rentan terhadap intrik dan manuver politik pemerintah yang korup. Bagaimana proses berdirinya Partai Islam Indonesia dari tingkat nasional hingga Padang Pariaman? Intrik politik apa yang dilakukan untuk menghalangi Parmusi Padang Pariaman? Bagaimana kiprah Parmusi Padang Pariaman pada pemilu 1971? Tiga pertanyaan yang disebutkan adalah pertanyaan utama yang akan dibahas dalam artikel ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk mengeksplorasi pembentukan dan perkembangan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) Cabang Padang Pariaman pada periode 1968-1971. Metode historis dipilih untuk memberikan analisis mendalam tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang relevan dengan objek studi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pembentukan dan perkembangan Parmusi di Padang Pariaman, seperti mantan pengurus Parmusi, aktivis politik pada masa itu, dan saksi sejarah lainnya. Selain itu, dokumen-dokumen arsip terkait seperti surat keputusan, instruksi pemerintah, dan dokumen internal Parmusi juga dianalisis. Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Parmusi, politik Islam di Indonesia, serta kondisi politik pada masa Orde Baru. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan kualitatif untuk menggambarkan kronologi dan proses pembentukan serta perkembangan Parmusi. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil (Daliman, [2018](#)). Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang pembentukan dan perkembangan Parmusi Cabang Padang Pariaman dalam konteks politik Indonesia pada masa Orde Baru.

PEMBAHASAN

Awal Mula Berdirinya Parmusi

Pada awal periode Orde Baru, mantan pendukung Masyumi yang berperan dalam menjatuhkan Orde Lama berharap dapat merehabilitasi Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (Mintaredja, [1968](#)). Namun, harapan tersebut ditolak tegas oleh Soeharto (M. Hasyim Syamsudi, [2015](#)). Alasan Soeharto menolak merehabilitasi Masyumi pada awal kepemimpinannya dijelaskan lebih lanjut oleh H.M.S Mintaredja bahwa Masyumi tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa akibat persengketaan antara pemerintah pusat dan daerah (Mintaredja, [1968](#)). Meskipun usaha merehabilitasi partai berlambang bulan bintang itu tidak disetujui, pada 7 Mei 1967 ditandatangani deklarasi pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didukung oleh 16 organisasi massa Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) (Rahawarin, [2022](#)). Sebagai partai politik berasaskan Islam, Parmusi menegaskan dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan partai:

- 1) Asas Partai adalah Islam
- 2) Tujuan Partai adalah bersama dengan semua golongan warga negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Pada 5 Februari 1968, Presiden Soeharto menerima para pendukung Partai Muslimin Indonesia beserta pimpinannya di Istana Negara. Alasan Soeharto merestui rencana pendirian Parmusi adalah pengakuannya terhadap keberadaan ormas-ormas Islam yang belum berafiliasi dengan salah satu parpol Islam yang jumlah pengikutnya sama besarnya dengan pengikut Partai Masyumi (Mintaredja, [1968](#)). Namun, dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto menegaskan larangan bagi pimpinan Masyumi untuk masuk dalam struktur Parmusi.

Pelarangan masuknya mantan pimpinan Masyumi dalam struktur Parmusi dapat dipahami sebagai bentuk ketakutan dari pemerintah Orde Baru terhadap kebangkitan kembali peranan Islam di panggung nasional. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melihat besarnya pengaruh mantan pimpinan Masyumi seperti M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, Anwar Harjono, dan lainnya dalam mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam (Kaunain, [2022](#)). Meskipun pemerintah meminta mantan pimpinan Masyumi untuk tidak dimasukkan dalam struktur kepengurusan, namun dalam Mukhtamar I Parmusi pada 2-7 November 1968 di Malang, tetap memasukkan nama-nama mantan pimpinan Masyumi, seperti Mr. Moh. Roem (Ketua Umum) dan Dr. Anwar Harjono, SH (Ketua I) Keputusan Ke I Partai Muslimin Indonesia di Malang tanggal 2-7 November 1968).

Intervensi pemerintah Orde Baru dalam masalah internal Parmusi semakin nyata setelah keluarnya telegram rahasia yang ditujukan kepada pimpinan Parmusi. Isi telegram tersebut antara lain menolak terpilihnya Mr. Moh. Roem sebagai Ketua Umum Parmusi. Sebagai penggantinya, Soeharto merestui terpilihnya H. Djarnawi Hadikusumo sebagai Ketua dan Drs. Lukman Harun sebagai Sekretaris Umum Parmusi. Sedangkan pengakuan berdirinya Parmusi ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968. Di dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa Parmusi merupakan penggabungan dari organisasi masyarakat Islam. Meskipun beberapa nama mantan pimpinan Masyumi telah dilarang masuk dalam struktur partai, namun beberapa pimpinan Parmusi tetap meminta dukungan mereka. Hal ini terbukti dengan tampilnya M. Natsir sebagai pembuka Konferensi Parmusi Cabang Krawang pada 28 Juli 1970 (Wawancara dengan Hasan Ahmad). Maka, sejak perkembangannya di tingkat pusat, Parmusi pun menyebar ke setiap wilayah Republik Indonesia, termasuk di Sumatera Barat dan Padang Pariaman.

Proses berdiri dan Intervensi yang Terjadi pada Parmusi Cabang Padang Pariaman

Sejak lahirnya Parmusi Sumatera Barat, cabang-cabang di setiap kotamadya dan kabupaten pun didirikan. Parmusi Cabang Padang Pariaman berdiri pada tahun 1968, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 214/1.- tanggal 29 Oktober 1968. Adapun susunan pengurus Parmusi Padang Pariaman ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Partai Nomor 214/1/29-68, dengan Drs. Raisuddin Muchtar sebagai Ketua. Meski kelahirannya ditunggu-tunggu oleh mantan politisi Masyumi, Parmusi Cabang Padang Pariaman tidak banyak bergerak. Kondisi ini disebabkan oleh lambannya pimpinan partai dalam mengembangkan Parmusi, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Kepemimpinan Parmusi Cabang Padang Pariaman didominasi oleh mantan aktivis Masyumi yang sering melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Orde Baru.

Sejak peristiwa tersebut, pengurus Parmusi Padang Pariaman mendapat sorotan dari pemerintah, intelijen, dan Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah). Pemerintah mempersulit jalannya Parmusi dengan mengharuskan penyelenggaraan rapat seizin Polres dan menempatkan intelijen dalam setiap rapat Parmusi. Setelah vakumnya kegiatan Parmusi Cabang Padang Pariaman, diadakan konsolidasi keluarga Bulan Bintang (mantan anggota Masyumi) pada 30 Maret 1970 di Masjid Taratak Pariaman. Berdasarkan hasil rapat yang dihadiri 150 orang, terpilihlah Nurmali Said sebagai Ketua Parmusi Padang Pariaman melalui SK Pimpinan Wilayah Parmusi Sumatera Barat.

Pada masa kepemimpinan Nurmali Said, aktivitas partai diselenggarakan dengan baik, termasuk turun ke nagari-nagari untuk menggalang simpatikan. Namun, kepemimpinannya hanya bertahan enam bulan karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970. Untuk mengisi kekosongan, diadakan Konferensi Cabang yang memilih Alhadar Alam sebagai Ketua Parmusi Padang Pariaman untuk periode 1970-1971 melalui SK No.249/K.U./71 tanggal 16 Maret 1971. Meski berstatus PNS, Alhadar Alam memantapkan hati untuk memimpin Parmusi berkat dukungan Bupati Padang Pariaman saat itu.

Pada kepemimpinan Alhadar Alam, kebijakan Parmusi diarahkan untuk persiapan Pemilu 1971. Pengurus sering mengadakan lawatan ke berbagai nagari guna meraih simpati dan suara. Namun, setiap acara partai selalu diikuti oleh intelijen dari Polres Pariaman. Untuk biaya administrasi, Parmusi Padang Pariaman umumnya mengandalkan pembiayaan dari anggota dan simpatikan, berbeda dengan Golkar yang mendapat dana besar dari

pemerintah. Minimnya dana terlihat dari instruksi Pimpinan Cabang yang mengusahakan membeli mesin ketik seharga Rp 30.000 dengan mengharapkan Rp 15.000 dari dana bantuan Pemilu.

Dalam upaya meraih dukungan massa jelang Pemilu 1971, Parmusi Padang Pariaman berusaha memperkuat diri sebagai kelanjutan program yang sebelumnya dirintis oleh Nurmal Said. Meskipun demikian, Alhadar Alam mengakui bahwa tidak semua kecamatan memiliki kepengurusan yang terbentuk dengan baik. Selain itu, intervensi dari Laksusda terhadap masyarakat di beberapa nagari semakin terasa, termasuk dalam upaya merendahkan citra Parmusi. Intervensi pemerintah terhadap partai politik tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Intervensi juga ditujukan kepada anggota partai dan calon legislatif, menyebabkan banyak anggota Parmusi yang keluar dan menyerahkan surat pengunduran diri. Wilayah yang sulit dipengaruhi pada saat itu adalah Kecamatan VII Koto/Sungai Sarik, yang sebelumnya merupakan basis PKI.

Partisipasi Parmusi Padang Pariaman Pada Pemilu 1971

Dalam persiapan menghadapi pemilu, Corps Pemilih, sebagai bagian dari sistem perekrutan calon legislatif Parmusi, mulai beroperasi dengan merekrut calon-calon legislatif. Namun, beberapa nama calon legislatif Parmusi dicoret oleh Laksusda dengan alasan dicurigai sebagai mantan anggota Masyumi. Hal ini terjadi dalam rapat Laksusda yang dihadiri oleh ketua-ketua partai dan Golkar. Setelah daftar calon yang diminta tidak terpenuhi, Laksusda menetapkan 20 calon tetap legislatif dari 34 orang calon sebelumnya. Meskipun mengalami intervensi dan kesulitan, Parmusi Padang Pariaman tetap berpartisipasi aktif dalam pemilu. Mereka menjalankan kampanye sebanyak 40 kali dalam dua bulan masa kampanye. Meskipun menghadapi intrik dan ancaman, Alhadar Alam tetap gigih dalam kampanyenya. Namun, sejumlah kecurangan terjadi pada hari pemilu, termasuk merusak kertas suara. Meskipun ada temuan kecurangan, namun tidak ada tanggapan dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Partisipasi Parmusi Padang Pariaman pada Pemilu 1971 mencerminkan upaya keras dalam menghadapi berbagai tantangan dan intervensi dari pemerintah serta Laksusda. Sebelum kampanye terbuka, pimpinan Parmusi memperingatkan agar anggota partai tidak membuat pernyataan politik tanpa izin ketua partai, untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, menghindari ambisi pribadi, dan mengembangkan sikap saling hormat di antara anggota partai. Selama masa kampanye terbuka, Persaingan antara Golkar dan Parmusi di Kabupaten Padang Pariaman menjadi sangat terasa. Golkar berusaha menunjukkan superioritasnya dengan membawa juru kampanye pusat, sementara Parmusi mengandalkan hubungan erat dengan pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran jadwal kampanye mereka.

Meskipun menghadapi berbagai intervensi pemerintah dan Laksusda, Parmusi Padang Pariaman tetap bersemangat dalam melakukan kampanye. Mereka menjalankan kampanye sebanyak empat puluh kali dalam waktu dua bulan. Bahkan, pimpinan Parmusi seperti Alhadar Alam tetap gigih dalam kampanyenya meskipun dihadapkan pada intrik dan ancaman. Pada hari pemilihan, terjadi beberapa kecurangan seperti manipulasi suara dan merusak kertas suara. Meskipun temuan kecurangan tersebut ada, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Panitia Pemilihan Indonesia. Hasil Pemilu 1971 di Padang Pariaman menunjukkan peningkatan suara untuk Parmusi, meskipun masih kalah dengan suara Golkar.

SIMPULAN

Parmusi Cabang Padang Pariaman berdiri pada tahun 1968 dengan Raisuddin Muchtar sebagai ketua dan Hasan Basri Amir sebagai sekretarisnya. Dua tahun kemudian, pada tahun 1970, Parmusi mengalami perombakan kepengurusan yang dipimpin oleh Nurmal Said sebagai ketua dan Zarlis Zakaria sebagai sekretaris. Di bawah kepemimpinan Nurmal Said, semua aktivitas partai dijalankan dengan efisien, bahkan pengurus Parmusi Padang Pariaman secara bersamaan turun ke desa-desa untuk menggalang dukungan masyarakat. Namun, kepemimpinan Nurmal Said hanya berlangsung sekitar enam bulan karena dia direshuffle akibat statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nurmal Said kemudian memilih untuk mengundurkan diri dari Parmusi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 6 tanggal 30 Maret 1970 yang melarang PNS aktif dalam politik. Alhadar Alam kemudian menggantikan kepemimpinan Nurmal Said.

Secara umum, Parmusi Padang Pariaman banyak mengalami intervensi dari pemerintah, terutama oleh Laksusda. Intervensi Laksusda ini tercermin dalam pencoretan 14 bakal calon legislatif Parmusi yang diduga mantan anggota Masyumi. Selain itu, setiap kegiatan rapat harus dilaporkan dan selalu diawasi oleh intel Polres Pariaman. Pada tanggal 3 Juli 1971, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Padang Pariaman disertai dengan beberapa kecurangan di

beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selama proses penghitungan suara, kesalahan terjadi di Kampung Pondok dan beberapa kecamatan lainnya. Setelah dilakukan penghitungan ulang, suara Parmusi semakin bertambah, meskipun masih belum mampu mengalahkan dominasi Golkar.

REFERENSI

- Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fatah, E. S. (2010). *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru : Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burung Merak Press.
- Jainuddin. (2019). Islam dan Politik Orde Lama; "Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 225–243.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.470>
- Kaunain, M. F. (2022). Pemikiran Hukum dan Demokrasi Prawoto Mangkusasmito. *Jurnal Studi Hukum*, 1(1).
- Kusumowidagdo, S. P. (1983). Pembangunan Politik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi. *Prisma No.1*.
- M. Hasyim Syamsudi. (2015). *Akhlaq Tasawuf: Dalam Konstruksi Piramida Ilmu Islam*. Malang: Madani Media.
- Mintaredja, H. (1968). *Sekilas Sedjarah (memoire) tentang Pemerintah dan Pembentukan Partai Muslimin Indonesia*. Jakarta.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Dinamika Partai Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salam, A. (2018). Bulan Bintang di Bawah Kuasa Beringin: Parmusi Padang Pariaman Masa Orde Baru. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.71>
- Warsito, A. (2020). *Perubahan Partai Muslimin Indonesia, dari Partai Politik ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 1968 M-1999 M*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.